

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta melalui pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan ini juga menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan atau kegagalan didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.

Yang menjadi acuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ;
2. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP ;
3. Peraturan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



4. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 48 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Dengan adanya Perpres ini pemerintah telah menerapkan suatu system pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, visi serta misi organisasi.

.Dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 berarti Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya dari Rencana Strategis yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama Tahun 2020, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan didalam Renstra telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja tersebut dituangkan kedalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020, sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders.

Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan yang berharga dan bermanfaat atas penilaian Laporan Kinerja sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Akhirnya,



kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dan bermanfaat untuk peningkatan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta guna mewujudkan "Good Governance" di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara Aamiin.

Jakarta, 31 Desember 2020

Kepala Badan Penghubung
Provinsi Kalimantan Barat


DASA SEKARTRIATIN ADINDA.S.SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19651006 198603 2 016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN
2. SUSUNAN ORGANISASI
3. TUPOKSI
4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)
5. SUMBER DAYA KEUANGAN
6. SARANA DAN PRASARANA

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. VISI
2. MISI
3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. PERJANJIAN KINERJA. (Tahun sesuai LKJ yang disusun)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Salak Nomor 32 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. yang terbentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dan 2, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;



- f. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7) ;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah berperan aktif dalam rangka pelaksanaan / penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya , oleh karena itu pada tiap akhir tahun anggaran akan menyampaikan pertanggungjawaban administrasi dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) . Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini diharapkan mampu untuk menggambarkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun Anggaran 2020 (1 Januari s.d 31 Desember 2020).

2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan Badan Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga



4. Sub Bidang Promosi Daerah
5. Sub Bidang Pelayanan
6. Kelompok Jabatan fungsional

Bagian-bagian tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

3. TUPOKSI

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 adalah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ,maka berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan dasar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat dimaksud, maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat mempunyai **tugas** :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asrama mahasiswa dan asset Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Penghubung menyelenggarakan

fungsi:

- a. Perumusan program kerja di bidang penghubung;
- b. Perumusan kebijakan dibidang penghubung;



- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penghubung;
- d. Pengkoordinasian di bidang penghubung;
- e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerinatahan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penghubung;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung;
- h. Penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga – lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- i. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- k. Pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa dan aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan lainnya;
- m. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia di Jakarta dan daerah lainnya;
- n. Penunjang koordinasi pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi , Kabupaten / Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan pariwisata berdasarkan berdasarkan kebijakan Gubernur;
- o. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- p. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan;



KEPALA BADAN MEMPUNYAI TUGAS :

Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan badan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas , **Kepala Badan mempunyai fungsi :**

- a. Penetapan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang penghubung daerah;
- d. Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, promosi daerah serta pelayanan.
- e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penghubung sesuai peraturan perundang - undangan;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga promosi daerah serta pelayanan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang penghubung daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang penghubung daerah yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang- undangan;

SUB BAGIAN TATA USAHA mempunyai tugas : menyusun rencana kerja, administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan keuangan, aset dan administrasi umum.



Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bag Tata Usaha** mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penyesuaian program kerja Badan serta tata usaha keuangan, asset, aparatur, dan administrasi umum;
- b. Pelaksanaan tata usaha keuangan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan;
- d. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan asset serta rumah tangga Badan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Badan;

SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA mempunyai tugas :
mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis melaksanakan fasilitasi hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;



- e. Pengelolaan sarana dan prasarana hubungan antar lembaga;
- f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang hubungan antar lembaga;
- h. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang hubungan antar lembaga;
- j. Pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga yang diserahkan oleh Kepala Badan.

SUB BIDANG PROMOSI DAERAH mempunyai tugas-tugas antara lain :
mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Barat dan daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, **Sub Bidang Promosi Daerah** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bidang Promosi Daerah;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembanaan promosi daerah ;
- c. Penyiapan bahan-bahan promosi daerah;
- d. Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik dan non elektronik;



- g. Pengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan di bidang promosi daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang promosi daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang promosi daerah yang diserahkan oleh Kepala Kantor.

SUB BIDANG PELAYANAN mempunyai tugas melakukan urusan protokoler dan perjalanan dinas terhadap pejabat eksekutif, legislatif Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta memfasilitasi pendayagunaan mess daerah dan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi

:

- a. Penyusunan program kerja di Sub Bidang Pelayanan;
- b. Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. Pengelolaan Mess Daerah dan Asrama Mahasiswa Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pelayanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang pelayanan yang diserahkan oleh Kepala Badan;



Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah PNS dalam jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan ketrampilan tertentu. Pegawai Jabatan Fungsional ini dijabat oleh pegawai fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan .

Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta per 31 Desember 2020 sebanyak 32 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan pangkat / golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

**TABEL 1
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN**

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2020
1	2	3
1.	Golongan IV /b	1 orang
2	Golongan IV /a	1 orang
3.	Golongan III/d	4 orang
4.	Golongan III/c	1 orang
5.	Golongan III/b	9 orang
6.	Golongan III/a	5 orang
7.	Golongan II/d	1 orang
8.	Golongan II/c	-
9.	Golongan II/b	6 orang
10.	Golongan II/a	2 orang
11.	Golongan I/c	1 orang
JUMLAH		31 orang



TABEL 2
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN ESELON

NO.	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2020
1.	Pejabat Struktural Eselon III Eselon IV	1 orang 4 orang
2.	Staf	26 orang
JUMLAH		31 orang

TABEL 3
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN	POSISI PER 31 DESEMBER 2020
1	2	3
1.	S3	-
2.	S2	2 orang
3.	S1	9 orang
4.	D4	-
5.	Sarmud / D3	7 orang
6.	SLTA	11 orang
7.	SLTP	1 orang
8.	SD	1 orang
JUMLAH		31 Orang



5.SUMBER DAYA KEUANGAN

TABEL 4
SUMBER DAYA KEUANGAN (APBD TA.2020)

N0	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN
1.	4.10.4.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.745.207.500,00
2.	4.10.4.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	840.054.500,00
3.	4.10.4.10.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	69.050.000,00
4.	4.10.4.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	227.720.000,00
5.	4.10.4.10.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	161.092.000,00
6.	4.10.4.10.01.01.15	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah	238.260.000,00
7.	4.10.4.10.01.01.16	Program Peningkatan Layanan Penghubung	1.199.053.000,00
TOTAL			4.480.437.400,00

6. SARANA DAN PRASARANA**TABEL 5****SARANA DAN PRASARANA**

NO	JENIS SARANA/PRASARANA	JLH	KETERANGAN
1.	Gedung Kantor + Mess		
	- Gedung Kantor	1	Ruang Kepala Kantor
		1	Ruang Rapat
		1	Ruang Kerja
		1	Ruang Tamu
		1	Garasi
	- Mess	4	Kamar VIP A (Kapasitas 1 Org)
		1	Kamar VIP B (Kapasitas 2 Org)
		8	Kamar VIP C (Kapasitas 4 Org)
		1	Kamar Standart (Kapasitas 10 Org)
2.	Bangunan Asrama	13	Tersebar di 8 Kota di Pulau Jawa : Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogya, Malang, Surabaya
3.	Bangunan Khusus	1	Anjungan Daerah Kalbar Taman Mini Indonesia Indah
4.	Kendaraan Roda Empat	5	Mobil Operasional (Penunjang kegiatan protokoler)

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Pada dasarnya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2020 tidak ada permasalahan yang menghambat jalannya program maupun kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Penghubung. Hal ini dapat dilihat dengan berjalannya program-program serta kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam DPA. Namun secara praktek di lapangan ada sedikit permasalahan yang dihadapi seperti :

1. SUBBAG TATA USAHA.

Secara garis besarnya, Subbag Tata Usaha tidak menghadapi permasalahan yang berarti. Ada beberapa kegiatan yang bersifat rutin yang terhambat penyelesaiannya, yaitu pembayaran listrik, telepon dan air dari asrama-asrama di luar Jakarta karena menunggu bukti pembayaran, itu merupakan permasalahan utama bagi subbag Tata Usaha.

SOLUSINYA :

Badan Penghubung menyurati pengurus asrama agar bukti pembayaran atau tagihan telpon, listrik dan air agar segera dikirim sebelum tanggal 10 bulan berikutnya.

2. SUB BIDANG PELAYANAN.

Kegiatan pengelolaan mess daerah dan kegiatan protokoler merupakan kegiatan yang tidak dapat ditunda-tunda mengingat tamu yang datang serta Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta bisa sewaktu-waktu dan tidak dapat dipastikan, sementara alokasi dana APBD akan terealisasi sekitar bulan Maret tahun berjalan. Hal tersebut merupakan kendala atau hambatan yang menjadi **permasalahan utama** bagi Sub Bidang Pelayanan yang perlu mendapatkan solusinya selain itu permasalahan lain yang perlu di sikapi dan perlu mendapatkan perhatian Khusus adalah SDM pada Sub Bidang Pelayanan adalah :

- a. SDM di bidang Protokoler untuk tenaga Lapangan dalam rangka pelayanan terhadap para pejabat eksekutif maupun legislatif Pemda Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
- b. SDM di Bidang tenaga sopir untuk pejabat dan driver full dalam rangka pelayanan terhadap para pejabat dan tamu selama berada di Jakarta.
- c. SDM di bidang tenaga resepsionis, dalam rangka pelayanan terhadap para tamu Mess.



SOLUSINYA :

- a. Adanya dana talangan yang tersedia pada triwulan I untuk menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Mess Daerah tidak terhambat.
- b. Adanya dana talangan yang tersedia pada Triwulan I untuk menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah, sehingga tidak menghambat terselenggaranya fasilitasi perjalanan dinas Pejabat.
- c. Mengingat rata-rata asrama Kalbar tiap tahunnya mempunyai kebutuhan baik sarana dan prasarana maupun perbaikan-perbaikan maka diharapkan anggaran untuk pengadaan dan rehab dapat menjangkau semua asrama Kalbar se Jawa.
- d. Perlu adanya Pelatihan meningkatkan Keterampilan/ keahlian bagi SDM dibidang Protokoler untuk tenaga lapangan dalam rangka pelayanan terhadap para Pejabat Eksekutif maupun Legislatif Pemda Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
- e. Perlu adanya pelatihan guna meningkatkan keterampilan/keahlian bagi SDM dibidang tenaga supir untuk Pejabat dalam rangka pelayanan terhadap para Pejabat dan tamu selama berada di Jakarta.
- f. Perlu adanya pelatihan guna meningkatkan keterampilan/keahlian bagi SDM di Bidang Tenaga resepsionis, dalam rangka pelayanan terhadap tamu mess.
- g. Kurangnya tenaga penjaga asrama di masing-masing asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa.

3. SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA.

Kegiatan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR-RI serta Pejabat lainnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga. Pada tahun 2020 ada 123 kali kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD ke Jakarta dan



dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Taman Mini Indonesia Indah.

Secara keseluruhan solusi yang harus dilaksanakan adalah penyediaan uang muka kerja di awal tahun sudah pasti sangat dibutuhkan untuk menunjang program-program yang telah direncanakan. Peran Kepala Badan sangat diandalkan untuk pemecahan permasalahan-permasalahan para Kepala Sub Bidang di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta, dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dapat mendukung penyelenggaraan program-program yang telah disusun oleh Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BADAN PENGHUBUNG

Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan perwujudan dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Bandung maupun kunjungan kerja DPR RI ke Pontianak Kalimantan Barat.

Permasalahan yang terjadi di Tahun 2020 pada Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga yaitu berkurangnya kegiatan Gubernur dan Pejabat lainnya ke luar daerah sehingga anggaran yang ada masih tersisa, akibatnya kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan masalah lain yang sering terjadi yaitu apabila kegiatan fasilitasi terjadi diawal tahun maka harus menyiapkan uang muka kerja untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Ini menjadi **permasalahan utama** bagi Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.

SOLUSINYA :

Kembali lagi anggaran yang menjadi penyebab lancar dan tidaknya permasalahan itu.

4. SUB BIDANG PROMOSI DAERAH

Kegiatan pada Sub Bidang Promosi Daerah Tahun 2020 yaitu 12 kali kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan. 12 kali kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan rutin diadakan dalam lingkungan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Tahun 2020, 12 kali kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan dapat terlaksana dengan baik. **Permasalahan** yang dihadapi Sub Bidang Promosi Daerah adalah belum optimalnya pendayagunaan Anjungan Kalimantan Barat di Taman Mini Indonesia Indah sebagai show window bagi pariwisata dan promosi seni budaya daerah Kalimantan Barat di Jakarta. Hal ini lebih disebabkan oleh keterbatasan jumlah kekayaan alat peraga seni budaya daerah yang ada di anjungan untuk dipromosikan, anggaran untuk kegiatan-kegiatan pentas seni budayadan pawai budaya yang ada pada tahun-tahun sebelumnya dianggarkan akan tetapi untuk beberapa tahun kedepan tidak dianggarkan, kondisi beberapa bangunan anjungan yang sudah rusak dan kurangnya peranserta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



1. VISI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut ke mana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Dalam konteks ini untuk tercapainya peningkatan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat, maka telah ditetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu ” *Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan* ”.

Adapun Visi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah

”Menjadikan Badan Penghubung sebagai Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan Sekitarnya”

Yaitu sebagai Duta Pemerintah Provinsi dalam rangka Peningkatan Hubungan Antar Lembaga yang loyal akan menambah keharmonisan dalam berhubungan di sektor birokrasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah-daerah lainnya dalam penyampaian informasi-informasi tentang Pemerintahan yang diperlukan untuk kepentingan kemajuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya.

Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dan mahasiswa asal Kalimantan Barat yang sedang berstudy di Pulau Jawa akan termonitoring dan terkoordinir baik saran, aspirasi maupun kritik-kritik yang membangun, sehingga terjadi komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan warganya.

Di bidang promosi daerah mengenai perkembangan kemajuan dari pariwisata, sosial budaya dan pertahanan keamanan Kalimantan Barat pada umumnya dapat dijabarkan melalui media pameran-pameran dan pagelaran-pagelaran yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diadakan oleh Institusi Pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga masyarakat di Jakarta.

2. MISI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Misi adalah suatu gambaran yang harus dilaksanakan agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan. Adapun yang menjadi misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja atau stakeholders di Jakarta dan daerah lainnya..
- c. Mewujudkan pelayanan administrasi untuk kelancaran hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat Kalimantan Barat di Jakarta.
- d. Meningkatkan kegiatan keprotokolan dan promosi daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada..
- e. Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap tamu Mess Daerah.
- f. Memberdayakan asrama Mahasiswa Kalimantan barat di Jakarta dan Daerah lainnya.

Rencana Strategis dan arah kebijakan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan pada ke 6 Misi yang akan dicapai yang tertuang dalam strategi atau kebijakan yang akan dijalankan sebagai berikut :



- a. Misi Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Strategi :

Meningkatkan karier Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan Hubungan Antar Lembaga

Kebijakan :

Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur dalam kegiatan Pendidikan dan Latihan (Diklat), Pelatihan-pelatihan teknis guna meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk Pembangunan.

- b. Misi Menjalin hubungan kerjasama dan koordinasi dengan mitra kerja atau stakeholder di Jakarta dan Daerah lainnya.

Strategi :

Memperluas jaringan kerjasama dengan mitra kerjasama dengan pihak / lembaga terkait untuk kepentingan pembangunan.

Kebijakan :

Mengembangkan kebijakan teknis kegiatan Badan Penghubung yang berkaitan dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, masyarakat serta swasta di Jakarta dan daerah lainnya.

- c. Misi Mewujudkan Pelayanan Administrasi untuk kelancaran hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Kalimantan Barat.

Strategi :



1. Penugasan personil dilapangan untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan Pemerintah provinsi Kalimantan Barat di Jakarta.
2. Memfasilitasi pertemuan antara Gubernur serta pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat, swasta di Jakarta dan daerah lainnya.

Kebijakan :

1. Memberikan pengarahan dan petunjuk kepada personil terhadap tugas yang diberikan untuk kelancaran pelayanan administrasi.
2. Memberdayakan organisasi kerukunan keluarga Kalimantan Barat (K3B) dan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kalimantan Barat (KPMKB).
 - a. Misi Meningkatkan kegiatan keprotokolan dan promosi daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Strategi :

Mendukung sarana transportasi untuk kegiatan keprotokolan dan promosi

Kebijakan :

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengikuti diklat keprotokolan dan mengikuti perkembangan promosi daerah.

- b. Misi Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap tamu Mess Daerah

Strategi :

Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan Mess.



Kebijakan :

Disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang
Pengelolaan Mess Daerah.

- c. Misi Memberdayakan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.

Strategi :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
2. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana bagi kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta olahraga.

Kebijakan :

1. Pembinaan terhadap pengelolaan asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
2. Menjadikan asrama mahasiswa sebagai pusat kegiatan yang positif dan bermanfaat dengan melalui kegiatan keagamaan, seni dan budaya serta olahraga

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja utama Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam Laporan Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2020 mengarah pada program core bisnis yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan Pemerintah Daerah
2. Mengoptimalkan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah



Adapun sasaran strategis beserta indikator utamanya dapat dilihat dalam tabel berikut

TABEL 1
SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan	100%
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerinbtah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Penyelenggaraan Layanan sesuai standart	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah	Rp.238.260.000,.	APBD
2.	Peningkatan Layanan Penghubung	Rp. 1.199.053.000,-	APBD

TOTAL.....Rp. 1.437.313.000,-



Untuk lebih jelasnya dapat dilihat program core bisnis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah

Hubungan antara Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Gubernur beserta aparatnya dan para Anggota DPR RI dan Lembaga terkait / Instansi vertikal di Jakarta dan di Jabodetabek dalam kegiatan- kegiatannya dapat terlaksana tanpa kendala yang berarti, demikian juga dengan para Gubernur-gubernur daerah lain di luar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Kementerian-Kementerian di Jakarta.

b. Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Program ini melaksanakan kegiatan pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah / Wakil dan Pejabat Daerah sehingga diharapkan ketepatan

waktu dan kenyamanan para pejabat dalam melaksanakan perjalanan dinas maupun kegiatan-kegiatan lain dapat dilaksanakan dengan baik. Program ini juga melaksanakan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat, penyediaan jasa penggunaan tanah bangunan gedung dan rumah, pengelolaan messs daerah, kegiatan peningkatan pelayanan Badan Penghubung & ADKB TMII pada hari-hari libur / kegiatan piket hari – hari libur.

Dengan demikian **Sasaran Strategis** yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfokus pada tindakan operasional organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi

Kalimantan Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sedangkan **Kebijakan Program** sebagai alat untuk mewujudkan sasaran strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan target. Kebijakan tersebut digolongkan dalam dua kelompok yaitu :

- a. Kebijakan Internal yaitu kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan.
- b. Kebijakan Eksternal adalah kebijakan yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi
- c. kegiatan masyarakat, kebijakan eksternal juga merupakan salah satu jenis kegiatan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan suatu program.

Pada dasarnya *Kebijakan* merupakan suatu ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar dapat tercapai, lancar dan terpadu dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

Sedangkan *Program* adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta alokasi anggaran atau kegiatan dalam rangka mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasi kegiatan tersebut.

Setiap Program harus secara eksplisit memiliki hasil (outcomes) yang akan dihasilkan pada akhir periode perencanaan. Penyusunan indikator hasil (outcomes) ini harus dilakukan secara cermat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaiannya.



B. PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan strategis atau dokumen yang dipersamakan dengannya yang telah ditetapkan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan dalam Rencana Kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2020.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu di dalam dokumen tersebut juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Sub Bidang di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja Badan Penghubung pada satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.

Selain itu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi sangat terbatas, sehingga tentunya berpengaruh juga terhadap kinerja Badan Penghubung. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila indikator kinerja program ditetapkan berdasarkan indikator outcome. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Indikator kinerja kegiatan



merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan pada akhir suatu periode tertentu. Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan akan dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang meliputi indikator kinerja *inputs*, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*.

TABEL 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan	100%
2	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Penyelenggaraan Layanan sesuai standart	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah	Rp.238.260.000,.	APBD
2.	Peningkatan Layanan Penghubung	Rp. 1.199.053.000,-	APBD
	JUMLAH / TOTAL	Rp. 1.437.313.000,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Outline Laporan Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2020.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja pada dasarnya merupakan acuan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator input, output maupun outcome untuk mengukur kehematan, efisiensi, efektifitas, kualitas serta akuntabilitas pencapaian sasaran dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .

1. PENGUKURAN KINERJA TERCAKUP 2 (DUA) HAL, SEBAGAI BERIKUT :

- a. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
- b. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah pula kinerjanya.
- b. Semakin rendah capaian kinerja menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin tinggi capaian kinerja menunjukkan semakin tinggi kinerjanya.

Adapun penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversikan dalam skala pengukuran ordinal yaitu **sangat berhasil** (nilai tengah 92,5%), **berhasil** (nilai tengah 77,5%), **cukup berhasil** (nilai tengah 62,5%) dan **tidak berhasil** (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut adalah rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.

Untuk pembelajaran pengukuran dan evaluasi atas kinerja beberapa kegiatan, ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya telah menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, mengingat Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang menjadi acuan pembuatan indikator pada umumnya masih dalam proses penyusunan, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya.



Indikator kinerja ditetapkan secara mandiri, yang meliputi indikator mikro, indikator strategis Pemerintah Daerah dan indikator makro.

Hasil pengukuran kinerja yang sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Kalbar di Jakarta merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran. Dan sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes), sedangkan indikator manfaat dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat belum sepenuhnya terbangun. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian baik kekurangan maupun kelebihan merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam lingkungan



organisasi, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana tetapi merupakan akumulasi, korelasi dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai suatu hasil dari sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri, tapi terkait dengan kerja bertahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka kewenangan Pemerintah Provinsi menjadi sangat terbatas, sehingga dengan kewenangan yang terbatas tersebut tentu berpengaruh terhadap kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Dalam hal ini kami menilai akan lebih



tepat manakala indikator kinerja program ditetapkan berdasarkan outcomes.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta Tahun 2020 dapat disajikan berdasarkan outline laporan kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini; (Core bisnis)

**TABEL 1
TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020**

N O	SASARA N STRATEG IS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan	12	9	72,06
2.	Terlaksananya	1. Peningkatan Pelayanan	17 Orang	17 Orang	98,46



Peningkatan layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Kedinasan Badan Penghubung dan Ajungan Kalbar TMII pada Hari-Hari Libur/Kegiatan Piket hari-hari Libur			
	2. Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat daerah di Jabodetabek	48 Kali	44 Kali	90,7
	3. Pagelaran kesenian dan kebudayaan	12 Kali Kegiatan	11 Kali Kegiatan	90,34
	4. Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung	13 PBB 4 Sewa Asrama	13 PBB 4 Sewa Asrama	94,73
	5. Pengelolaan Mess Daerah	1 Mess	1 Mess	98,17
	6. Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar	16 Asrama	16 Asrama	100
	7. Pawai Budaya	1 Kali	-	-

Penjelasan

Sasaran Strategis 1 :

Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta merupakan program yang mempunyai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya.



a. Perbandingan antara Target dengan dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan	12 Kegiatan	9 Kegiatan	72,06%

Program/ kegiatan ini menjadi prioritas utama karena program tersebut merupakan core bisnis di Badan Penghubung dalam memfasilitasi kegiatan kedinasan Pejabat selama di Jakarta maupun daerah lainnya se-Jabodetabek yang dilaksanakan pada hari kerja ataupun hari-hari libur /hari-hari besar sesuai dengan kegiatan / acara pada saat itu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL). Subbid ini didukung oleh para staf yang cekatan dan siap serta mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun Program/ kegiatan ini mengalami penurunan dalam pencapaian kinerja dikarenakan wabah Virus Covid-19 sehingga semula target 12 Kegiatan (100%), Badan Penghubung hanya mampu mencapai realisasi tercapai 9 Kegiatan pencapaian kinerja sebesar 72,06 %.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Suber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Peningkatan Fasilitas dan Kemitraan antar sektor dan Pemda	238.260.000	101.323.600	72,06	95,5%	6,16 %

Sasaran Strategis 2 :

Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta merupakan program yang mempunyai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalbar (TMII) pada hari-hari libur/kegiatan piket hari-hari libur pencapaian kinerja dengan target 17 Orang (100%), realisasi 9 Orang, pencapaian kinerja sebesar 98,46%.
2. Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 48 Kali (100%), realisasi 44 Kali, pencapaian kinerja sebesar 90,7 %.
3. Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 12 kali (100%), realisasi 11 kali kegiatan, pencapaian kinerja sebesar 90,34 %.
4. Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se-Jawa yang menunjang



keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 13 PBB dan 4 Sewa Asrama (100%), realisasi 13 PBB 4 Sewa Gedung, pencapaian kinerja sebesar 94,73 %.

5. Pengelolaan Mess Daerah yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target Rp. 150.000.000 (100%), realisasi Rp. 66.365.000, pencapaian kinerja sebesar 44,24 %
6. Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 16 Asrama (100%), Realisasi 16 Asrama, Pencapaian Kinerja sebesar 100%
7. Pawai Budaya yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 1 Kali Kegiatan (100%), tidak bisa terealisasi dikarenakan Wabah Covid-19.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalbar (TMII) pada hari-hari libur/kegiatan piket hari-hari libur	17 Orang	17 Orang	98,46%
		2. Pengelolaan Protokoler dan perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek	48 Kali	44 Kali	90,7%
		3. pagelaran kesenian dan kebudayaan	12 Kali	11 Kali	90,34%
		4. Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung	13 PBB 4 Sewa Asrama	13 PBB 4 Sewa Asrama	94,73%



		5. Pengelolaan Mess Daerah	150.000.000	66.365.000	44,24 %
		6. Monitoring dan Evaluasi asrama mahasiswa Kalimantan Barat	16 Asrama	16 Asrama	100 %
		7. Pawai Budaya	1 Kali	-	-

Program/kegiatan diatas menjadi prioritas utama mengingat kegiatan fasilitasi perjalanan dinas pejabat , pagelaran kesenian dan kebudayaan, pembayaran PBB asrama mahasiswa ,pengelolaan mess ,pelaksanaan piket hari-hari libur merupakan core bisnis dari Badan Penghubung. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan, Sub Bidang Promosi Daerah, dan Subbag Tata Usaha dengan didukung oleh para staf yang mampu dalam pelaksanaan sehingga dapat menunjang pencapaian kinerja Badan Penghubung di Jakarta.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%		
3.	Telaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Peningkatan Layanan Penghubung	1.199.053.000	1.150.431.322	95,01	95,01%	

Didalam Perjanjian Kinerja ini tiap program terdapat pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah terdapat 1 (satu) kegiatan :
 - a. Fasilitasi kegiatan Gubernur dan DPR, DPD RI serta pejabat lainnya, dengan alokasi anggaran Rp. 238.260.000



2. Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah, terdapat 7 (Tujuh) kegiatan :
 - a. Kegiatan peningkatan pelaksanaan kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalimantan Barat Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada hari-hari libur/kegiatan piket hari-hari, dengan alokasi dana Rp. 74.176.000,-
 - b. Kegiatan Pengelolaan protokoler dan perjalanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Daerah di Jabodetabek, dengan alokasi dana Rp. 207.340.000,-
 - c. Kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan, alokasi dana Rp. 287.320.000,-
 - d. Kegiatan penyediaan jasa penggunaan tanah, bangunan gedung dan rumah, dengan alokasi anggaran Rp. 354.066.000,-
 - e. Kegiatan pengelolaan mess daerah, alokasi anggaran Rp. 191.606.000,-
 - f. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat Rp. 36.495.000,-
 - g. Kegiatan Pawai Budaya Rp. 48.050.000,-

b. Perbandingan antara realisasi Kinerja Tahun 2018, 2020 dan target 2020

Perbandingan realisasi Kinerja 2019-2020 dan Target Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI		Target 2021	Tingkat Kemajuan
			2019	2020		
1.	Perlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	95,5	72,06	100	- 23,44%



	Kalimantan Barat di Jakarta					
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Jumlah piket hari-hari libur	68,13	98,46	100	30,33%
		2. Jumlah fasilitasi perjalanan dinas Pejabat di Jabotabek	98,66	90,7	100	-7,96%
		3. Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan	99,10	90,34	100	-8,76%
		4. Jumlah Pembiayaan PBB dan sewa untuk asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa	84,91	94,73	100	9,82%
		5. Jumlah pengelolaan Mess Daerah	96,76	98,17	100	1,41%
		6. Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar	-	100	100	100%
		7. Pawai Budaya	-	-	100	-

Pejelasan :

1. Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya

Terwujudnya kesamaan persepsi dengan petugas Kementerian, Lembaga-lembaga Negara tentang SOP dalam memfasilitasi kegiatan pejabat Kalimantan Barat untuk melaksanakan kegiatan. Selain itu tidak ada lagi kesalahan prosedur dengan petugas Kementerian, Lembaga-lembaga Negara dalam memberikan fasilitasi kepada pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hal ini disebabkan oleh tersedianya SOP baku yang dapat menjadi panduan tertulis semua pihak dalam memberikan fasilitasi pelayanan pendampingan pada pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga terwujudnya konsistensi standar fasilitasi pendampingan terhadap pimpinan tanpa tergantung pada satu

orang individu saja. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga (HAL). Subbid ini didukung oleh para staf yang cekatan dan siap serta mempunyai kemampuan yang dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program/ kegiatan ini menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dapat dibuktikan dengan target 12 Kali realisasi tercapai 9 Kali pencapaian kinerja sebesar 72,06 %.

2. Jumlah Piket Hari-Hari Libur :

Dalam mengantisipasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, DPR RI dan Pejabat lainnya yang bertepatan pada hari libur maka di laksanakan piket hari-hari libur sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, DPR RI, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan tepat waktu dan didukung oleh petugas yang partisipatif dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti. Hal ini dapat dibuktikan dengan target pencapaian kinerja 17 Orang Petahun terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 98,46 %.

3. Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas Pejabat di Jabotabek :

Dalam melaksanakan tugas ini Petugas Protokoler yang memlaksanakan tugas ini selalu melaksanakan SOP secara konsisten. Protokoler melakukan koordinasi dengan Petugas / Staf PT Angkasa Pura 2 dan otoritas Bandara, Selain itu dukungan atasan langsung dalam rangka ketersediaan dana kegiatan, ketersediaan staf yang handal dan berkompotensi dalam bidang keprotokolan. keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 48 Kali, realisasi 44 Kali, pencapaian kinerja sebesar 90,7 %.

4. Jumlah Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan :

Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun dengan Jumlah Kegiatan yang bervariasi dalam setiap tahunnya, Kegiatan ini dilaksanakan dan disesuaikan dengan kalender kegiatan dari Pihak Taman Mini Indonesia Indah, selain

itu dukungan dari pimpinan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sangat berperan dalam hal efisiensi pengguna sumber daya yang ada di Sub Bidang Promosi Daerah serta sikap yang kooperatif dari pihak ketiga dan pihak luar / Badan Penghubung seluruh Indonesia dan kepedulian dari sesama Badan Penghubung seluruh Indonesia juga tersedianya staf dan petugas promosi daerah Kalimantan Barat dalam mendukung setiap kegiatan pagelaran kesenian Kalimantan Barat. keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 12 kali, realisasi 11 kali, pencapaian kinerja sebesar 90,34 %.

5. Jumlah Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah dan sewa untuk asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa :

Dalam kegiatan ini Jumlah Pembiayaan PBB dan Sewa untuk Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat se-Jawa yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 13 asrama dan 4 Sewa Asrama, realisasi 13 asrama dan 4 Sewa Asrama, pencapaian kinerja sebesar 94,73 %.

6. Jumlah Pengelolaan Mess Daerah :

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari kinerja petugas dalam pemberian pelayanan diluar tugas pokok dan fungsinya serta semangat dari para petugas mess walaupun tanpa biaya operasional. Petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan diluar tugas pokoknya yang memerlukan yang seharusnya memerlukan biaya cukup besar dan tidak dapat ditutupi dengan biaya retribusi yang dikenakan, namun petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan diluar pelayanan / tugas pokok / operasional mess tanpa dikenakan biaya tambahan. keberhasilan pencapaian kinerja dengan target 1 Mess , realisasi 12 bulan, pencapaian kinerja sebesar 98,17 %.

7. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung, Salah satu tugas Badan Penghubung adalah Pembinaan Terhadap Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat Se Pulau Jawa.

Dalam melaksanakan pembinaan tersebut Badan Penghubung memonitoring Asrama baik dari bangunan yang merupakan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Mahasiswa Kalimantan Barat yang berdomisili di Asrama tersebut. Setelah monitoring, Badan Penghubung Melakukan Evaluasi hal-hal yang diperlukan untuk Mahasiswa maupun kerusakan atau kendala yang ada di Asrama tersebut. Untuk tahun ini target Asrama ada 16 dan capaian 16 Asrama jadi pencapaian kinerja 100%

8. Pawai Budaya

Pawai Budaya merupakan kegiatan tahunan yang di selenggarakan oleh TMII dan Anjungan Kalimantan Barat TMII juga diwajibkan untuk berperanserta dalam kegiatan/agenda tahunan TMII tersebut.

Dalam kegiatan ini Anjungan Kalimantan Barat mempromosikan Budaya dan Adat Istiadat dari Kalimantan Barat. Namun untuk tahun 2020 ini Pawai Budaya ditiadakan sementara oleh pihak Taman Mini Indonesia Indah dikarenakan oleh Wabah Covid-19 yang melanda Indonesia. Jadi untuk capaian kinerja masih belum bisa terealisasi.

c. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah :

Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat lainnya yang menunjang keberhasilan adalah dikarenakan adanya kesamaan persepsi dengan petugas VIP Bandara tentang pejabat Kalimantan Barat yang berhak untuk mendapatkan fasilitasi pelayanan serta tersedianya SOP baku yang dapat menjadi panduan tertulis semua pihak dalam memberikan fasilitasi pelayanan pendampingan pada pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga terwujudnya konsistensi standar fasilitasi pelayanan pendampingan terhadap pimpinan tanpa tergantung pada satu orang individu saja. Namun di tahun 2020 ini capaian kinerja tidak bisa di capai seperti tahun sebelumnya dikarenakan adanya musibah Wabah Covid-19 sehingga mengurangi kegiatan-kegiatan dan agenda-agenda Kementerian terganggu, Hal ini dapat



dilihat dari menurunnya target Capaian kinerja /perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 72,06 % .

Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan ADKB TMII pada Hari-hari Libur / Kegiatan Piket hari-hari libur

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan ADKB TMII pada Hari-hari Libur / Kegiatan Piket hari-hari libur yang menunjang keberhasilan adalah dikarenakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan tepat waktu dan didukung oleh petugas yang partisipatif dan bertanggung jawab sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan kinerja terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 98,46 %.

Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Lainnya di Jabodetabek

Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/ Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek yang menunjang keberhasilan adalah dikarenakan kepedulian serta peran petugas yang melaksanakan SOP sesuai dengan prosedur dan selalu melakukan koordinasi dengan petugas / staf terkait dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang berkompeten dalam bidang ini juga dapat diandalkan dalam berkerjasama dengan pihak PT Angkasa Pura 2 dan otoritas Bandara Soekarno Hatta sehingga tidak menimbulkan ketidakpuasan bagi penerima pelayanan hal ini dapat terlihat dari pernyataan sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 90,7 %.

Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan yang menunjang keberhasilan dikarenakan sikap yang kooperatif dari pihak ketiga dan pihak luar /Badan Penghubung seluruh Indonesia serta rasa kepedulian dari Badan Penghubung seluruh Indonesia dan tersedianya staf dan petugas seni dan



budaya Kalimantan Barat yang handal dan profesional dalam mendukung setiap kegiatan pagelaran kesenian hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan kinerja terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 90,34 %.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengguna Tanah, Bangunan Gedung yang menunjang keberhasilan adalah dikarenakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan dengan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan kinerja terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 94,73 %.

Kegiatan Pengelolaan Mess Daerah

Kegiatan Pengelolaan Mess Badan Penghubung yang menunjang keberhasilan adalah dikarenakan meningkatnya jumlah tamu yang menginap di mess sehingga target terlampaui dan juga dikarenakan para petugas dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena memberikan pelayanan yang maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan kinerja terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 98,17 %

Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat yang menunjang keberhasilan adalah adanya sinergitas antara Mahasiswa Kalimantan Barat dan Badan Penghubung dalam melakukan kerja sama dalam menyampaikan data mahasiswa, berbagai tagihan dan laporan keadaan asrama yang mereka tempati, sehingga apabila ada kekurangan yang terjadi



maka Badan Penghubung dapat mengevaluasi dan melaporkannya/menyampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat sebagai masukan, hal ini adapat dibuktikan dengan pernyataan kinerja terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 100 %

Pawai Budaya

Kegiatan Pawai Budaya merupakan agenda tahunan dari Taman Mini Indonesia Indah, kegiatan ini diwajibkan untuk semua Anjungan atau Perwakilan Daerah yang ada di TMII untuk Mengikuti Kegiatan tersebut. Dalam acara tersebut Anjungan Kalimantan Barat beberapa kali mendapatkan penghargaan. Akan tetapi untuk Tahun 2020 ini pihak TMII tidak menyelenggarakan Pawai Budaya ini dikarenakan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia, sehingga untuk capaian kinerja di tahun 2020 ini tidak bisa dilakukan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;

TABEL 2

REALIASASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN MASING-MASING URUSAN YANG MENJADI PRIORITAS/CORE BISNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR TAHUN 2020



N O	URUSAN WAJIB	BEL ANJ A TDK LAN GSU NG (Rp)	BELANJA LANGSUNG			TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	M O D A L			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
1.	Fasilitasi Kegiatan Gubernur serta Pejabat lainnya	-	113.220.000	94.120.000	-	207.340.000	168.058.600	72,06
2.	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung & ADKB TMII pada Hari-hari libur / Kegiatan Piket pada Hari-hari libur	-	-	74.176.000	-	74.176.000	73.032.000	98,46
3.	Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek	-	113.220.000	94.120.000	-	207.340.000	192.472.000	90,7
4.	Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	-	113.220.000	174.100.000	-	287.320.000	275.250.000	90,34
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah,	-	-	354.066.000	-	354.066.000	339.820.322	94,73



	Bangunan, Gedung							
6.	Pengelolaan Mess Daerah	-	113.220.000	78.386.000	-	191.606.000	185.312.000	98,17
7.	Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar	-		36.495.000	-	36.495.000	0	100
8.	Pawai Budaya	-	12.300.000	35.750.000	-	48.050.000	0	0
			465.180.000	941.213.000	-	1.406.393.000	1.162.056.922	82,62

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

TABEL 3

REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH PROGRAM YANG MENJADI CORE BISNIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALBAR

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2021
			2018	2019	2020	
1.	Perlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pejabat Lainnya	176.491.613 (90.47 %)	214.249.400 (89.40%)	238.260.000 (72,06%)	100 %



	Barat di Jakarta					
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Jumlah piket hari-hari libur 2. Jumlah fasilitas perjalanan dinas Pejabat di Jabodetabek 3. Jumlah pagelaran kesenian dan kebudayaan 4. Jumlah Pembiayaan PBB dan sewa untuk asrama mahasiswa Kalimantan Barat se Jawa 5. Jumlah pengelolaan Mess Daerah	670.330.343 (98,62 %)	1.066.495.000 (92,16 %)	1.199.053.000 (95,01 %)	100 %
TOTAL			846.821.956 (96,57%)	1.280.744.400 (91,70%)	1.437.313.000 (93.8%)	100 %

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

a. Kegiatan Pengelolaan Mess Daerah,

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang sekaligus dapat memberikan kontribusi pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari retribusi jasa usaha secara intensif. Mess daerah merupakan salah satu core bisnis Badan



Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, selain pelayanan dalam bentuk pemeliharaan, rehabilitasi, pengadaan guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan kepada pelanggan juga pelayanan dalam bentuk biaya / tarif yang terjangkau baik oleh para pejabat daerah khususnya maupun oleh masyarakat Kalimantan Barat umumnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dilihat keberhasilan / kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi yang dilakukan. Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Pemerintah melalui Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terus meningkatkan semangat untuk menggali potensi dari jasa usaha yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan terus dilakukan secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari upaya perbaikan mess, baik rehab, pemeliharaan sampai dengan pengadaan agar kondisi mess semakin lebih baik terbukti pengunjung tiap tahunnya semakin bertambah sehingga retribusi jasa usaha yang berasal dari sewa Mess Daerah meningkat tiap tahunnya.

Namun di tahun 2020 realisasi retribusi jasa usaha dari mess Daerah hanya bisa mencapai Rp. 66.365.000,00 turun jauh dari tahun sebelumnya yaitu Rp. 196.810.000,00 dikarenakan pandemi Virus Corona-19.

2. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Penurunan kinerja sementara ini hanya disebabkan terdapatnya permasalahan dalam pemberian pelayanan diluar obyek seperti biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan diluar tugas pokoknya yang

memerlukan biaya cukup besar dan tidak dapat ditutupi dengan biaya retribusi yang dikenakan, sehingga harus ada pengaturan mengenai biaya operasional petugas yang memberikan pelayanan kepada pelanggan diluar pelayanan /tugas pokok /operasional mess yaitu diluar biaya yang ditetapkan dalam tarif retribusi dan biaya ini ditanggung oleh pelanggan.

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan berbagai alternatif solusi dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dari retribusi Jasa Usaha secara intensif dan guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka beberapa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, dan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka kelancaran tugas pada setiap pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/WK dan Pejabat Daerah di Jabodetabek

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jakarta mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar pemerintah / lembaga-lembaga

di Jakarta, mewakili pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat yang tidak bersifat teknis di Jakarta, kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. Kegiatan protokoler merupakan core bisnis dari Badan Penghubung dimana para pejabat yang akan bertugas ke Jakarta dapat datang sewaktu-waktu oleh karena itu pelayanan dalam rangka fasilitasi dan pengelolaan protokoler harus tetap terpenuhi.

1. Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Penyebab dari keberhasilan / peningkatan kinerja pada kegiatan protokoler yaitu :

- a) Terwujudnya kesamaan persepsi dengan petugas VIP Bandara tentang pejabat Kalimantan Barat yang berhak untuk mendapatkan pelayanan protokoler pimpinan.
- b) Berkurangnya keluhan/ ketidakpuasan dalam pelayanan protokoler pimpinan dari pejabat selain Gubernur Kalbar setiap tahun.
- c) Tidak ada lagi mis-komunikasi dengan petugas VIP Bandara dalam memberikan pelayanan protokoler pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Tersedianya SOP baku yang dapat menjadi panduan tertulis semua pihak dalam memberikan pelayanan protokoler pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar.
- e) Terwujudnya konsistensi standar pelayanan pimpinan tanpa tergantung pada satu orang individu saja.

2. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Adapun penyebab dari menurunnya kinerja lebih diakibatkan oleh beberapa hal antara lain :

- a) ketersediaan dana yang dirasa perlu untuk mendukung kegiatan protokoler
- b) Sikap yang kurang kooperatif dari pihak ketiga dan pihak luar

- c) Kurang ketersediaan staf yang handal
- d) Kurang ketersediaan sarana dan prasarana kerja

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a) Petugas selalu melaksanakan SOP ini secara konsisten dengan petugas yang berkompeten dibidang protokoler.
 - b) Melakukan revisi SOP untuk menyesuaikan dengan regulasi terkini, misalnya karena terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .
 - c) Petugas / staf terkait dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat diikutsertakan dalam diklat-diklat khusus yang berorientasi pada peningkatan pelayanan.
 - d) Kepada pihak PT Angkasa Pura 2 dan otoritas Bandara Soekarno Hatta disarankan untuk selalu melakukan sinkronisasi regulasi dan SOP sesuai dengan perkembangan dinamika yang terjadi.
 - e) Kepada Pemerintah Provinsi lainnya se-Indonesia diharapkan dapat mengambil langkah yang sama dengan yang dilakukan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.
 - f) Dukungan atasan langsung dalam rangka ketersediaan dana kegiatan, ketersediaan staf yang handal dan berkompetensi dalam bidang keprotokolan.
- c. Kegiatan fasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta Pejabat lainnya.**

Pemenuhan kebutuhan anggaran diawal tahun sebagai kendala yang sedikit menghambat kegiatan ini.

1. Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Penyebab dari keberhasilan / peningkatan kinerja pada kegiatan fasilitasi yaitu :



- a) Terwujudnya kesamaan persepsi dengan petugas Kementerian, Lembaga-lembaga Negara tentang fasilitasi pendampingan Gubernur, Wakil Gubernur, DPR RI dan Pejabat Lainnya Kalimantan Barat setiap tahun.
- b) Tidak terdapatnya pengaduan tentang ketidakpuasan dalam memfasilitasi Gubernur, Wakil Gubernur, DPR RI dan Pejabat Lainnya setiap tahun.
- c) Tidak ada lagi kesalahan prosedur dalam memberikan fasilitasi kepada pimpinan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Tersedianya SOP baku yang dapat menjadi panduan tertulis semua pihak dalam memberikan fasilitasi pendampingan pada pimpinan Pemerintah Provinsi Kalbar.
- e) Terwujudnya konsistensi standar fasilitasi pendampingan terhadap pimpinan tanpa tergantung pada satu orang individu saja.

2. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Adapun penyebab dari menurunnya kinerja lebih diakibatkan oleh beberapa hal antara lain :

- a) Ketersediaan dana yang dirasa perlu untuk mendukung kegiatan Fasilitasi kegiatan Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya.
- b) Sikap yang kurang kooperatif dari pihak ketiga dan pihak luar terhadap Petugas yang memfasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya.
- c) Kurang ketersediaan staf yang handal dalam rangka fasilitasi pelayanan guna pendampingan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya.
- d) Kurang ketersediaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya.

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu :

- a) Petugas selalu melaksanakan SOP ini secara konsisten dengan petugas yang berkompeten dibidang fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya.
- b) Melakukan revisi SOP untuk menyesuaikan dengan regulasi terkini, misalnya karena terjadi perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .
- c) Petugas / staf terkait dari Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat diikutsertakan dalam diklat-diklat khusus yang berorientasi pada kegiatan fasilitasi
- d) Dukungan atasan langsung dalam rangka ketersediaan dana kegiatan, ketersediaan staf yang handal dan berkompeten di bidang fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan DPR RI serta pejabat lainnya

d. Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan

Kegiatan ini juga sangat penting dalam rangka mempromosikan seni dan budaya Kalimantan Barat yang sewaktu-waktu diperlukan oleh para wisatawan atau unit vertikal terkait atau kelembagaan masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan mengarah pada pelaksanaan kegiatan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta khususnya di TMII Jakarta melalui program fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pagelaran kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat. Untuk tahun 2020 ini kegiatan promosi daerah banyak mengalami penurunan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat

berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan disisi lain dapat meningkatkan kinerja dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Penyebab keberhasilan kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan dapat dilihat dari

- a) Dukungan dari pimpinan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.
- b) Sikap yang kooperatif dari pihak ketiga dan pihak luar / Badan Penghubung seluruh Indonesia
- c) Kepedulian dari sesama Badan Penghubung seluruh Indonesia
- d) Tersedianya staf dan petugas pagelaran kesenian dan budaya Kalimantan Barat dalam mendukung kegiatan.
- e) Kurang ketersediaan sarana dan prasarana

2. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Adapun penyebab dari menurunnya kinerja lebih disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

- a) Masukan dana yang tidak dapat mengcover seluruh kegiatan promosi daerah Kalimantan Barat
- b) Kurangnya petugas pagelaran kesenian dan budaya yang harus didatangkan dari Kalimantan Barat dikarenakan biaya yang kurang memadai padahal mereka sangat

dibutuhkan dalam rangka pentas seni budaya serta pagelaran seni budaya Kalimantan Barat.

- c) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pagelaran kesenian dan kebudayaan Kalimantan Barat.

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya pemecahan masalah dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam kegiatan promosi daerah dilakukan beberapa tindakan yaitu :

- a. Menggali potensi dari staf promosi daerah Kalimantan Barat, dengan secara terus menerus berlatih sehingga memperkecil kebutuhan untuk mendatangkan petugas seni dan budaya dari daerah Kalimantan
- b. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana guna kelancaran kegiatan promosi daerah Kalimantan Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut :



Tabel 5

Realisasi Anggaran Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi Target (%)
1.	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah (Perwakilan) : Fasilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR, DPR RI serta Pejabat Lainnya.	207.340.000	168.058.600	39.281.400	72,06
2.	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah :				
	1. Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung & ADKB TMII pada Hari-hari libur / Kegiatan Piket pada Hari-hari libur	74.176.000	73.032.000	1.144.000	98,46
	2. Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek	207.340.000	192.472.000	14.868.000	90,7
	3. Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan	287.320.000	275.250.000	12.070.000	90,34
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan, Gedung dan Rumah	354.066.000	339.820.322	14.245.678	94,73
	5. Pengelolaan Mess Daerah	191.606.000	185.312.000	6.294.000	98,17
	6. Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar	36.495.000	36.495.000	0	100
	7. Pawai Budaya	48.050.000	0	0	0

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran untuk Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah Perwakilan ;



Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Gubernur Dan DPR, DPD RI Serta Pejabat lainnya terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 89,40 %

2. Realisasi Anggaran Untuk Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dan Kegiatan Pemerintah Daerah ;

- a) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan ADKB TMII pada Hari-hari Libur / Kegiatan Piket hari-hari libur terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 68,13 %.
- b) Kegiatan Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/ Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 98,66 %.
- c) Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 98,10 %.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan Gedung terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 84,91 %.
- e) Kegiatan Pengelolaan Mess Daerah terwujud sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 dengan capaian target 96,76 %.

TABEL 6

REALISASI ANGGARAN YANG TELAH TERSERAP UNTUK PROGRAM KEGIATAN CORE BISNIS BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI JAKARTA TAHUN 2020

N O	PROGRAM	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Program Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah Fasilitasi Kegiatan Gubernur dan DPR, DPR RI serta Pejabat Lainnya	207.340.000,00	100 %	168.058.600,00	72,06
2.	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah :	1.199.053.000,00	100 %	1.162.056.922,00	96,91



1. Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung & ADKB TMII pada Hari-hari libur / Kegiatan Piket pada Hari-hari libur				
2. Pengelolaan Protokoler dan Perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek				
3. Kegiatan Pagelaran Kesenian dan Kebudayaan				
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah, Bangunan, Gedung dan Rumah				
5. Pengelolaan Mess Daerah				
6. Monitoring dan Evaluasi Asrama Mahasiswa Kalbar				
7. Pawai Budaya				
TOTAL	1.437.313.000	100 %	1.330.115.522	92,54

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari s.d. Desember 2020.

Dalam Tahun Anggaran 2020 ini, Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 7 (Tujuh) program yang meliputi 51 (lima puluh satu) kegiatan untuk mencapai 7 sasaran strategis dalam rangka mencapai visi, misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk



membayai program dan kegiatan tersebut, telah ditetapkan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp. 4.480.437.000,00 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung

**Sasaran-Sasaran Yang Termasuk Dalam Kategori Sangat Berhasil
Terdiri Dari :**

1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Terpenuhinya Peningkatan Sarana Dan Prasarana.
3. Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Terpenuhinya Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS.
5. Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
6. Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Terpenuhinya Peningkatan Partisipasi dan Kemitraan Antar Sektor dan Pemerintah Daerah.
8. Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran dipengaruhi oleh upaya dan kerja keras Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian capaian tersebut di atas belumlah optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan masyarakat yang disebabkan terbatasnya dukungan personil, anggaran/dana, sarana dan prasarana kerja. Akibatnya ada beberapa kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan sehingga



mempengaruhi tingkat pencapaian kinerja yang sesuai dengan target kinerja.

Untuk kedepannya sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan lagi pelayanan administrasi perkantoran terhadap kegiatan prioritas
2. Sarana dan prasarana untuk kebutuhan Badan Penghubung termasuk Anjungan Daerah Kalimantan Barat di TMII dan asset lain /asrama akan lebih diupayakan untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya
3. Keberhasilan kinerja Badan Penghubung akan lebih meningkat oleh karena itu diperlukan disiplin yang lebih tinggi kepada para pegawai dalam melaksanakan berbagai tugas dan kewajiban yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Kalimantan Barat.
4. Bahwa Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan jembatan penghubung birokrasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya se- Indonesia akan lebih mengupayakan peningkatan fasilitasi, partisipasi, kemitraan, kapasitas, disiplin dan juga peningkatan sarana dan prasarana secara optimal.

Dengan dilaksanakan langkah-langkah tersebut diatas akhirnya dalam



mencapai visi dan misi dirasa cukup meningkat dan sesuai dengan tujuan sehingga dapat diharapkan kedepan, tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat bisa menjadi salah satu ujung tombak serta andalan Pemerintah dan juga cermin kebudayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jakarta, 31 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


DASA SEKARTRIATIN ADINDA.S.SOS
Pembina Tingkat I
NIP. 19651006 198603 2 016



LAMPIRAN :
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

SKPD : Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di
Jakarta
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlaksananya Pelayanan dan Koordinasi Kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Peningkatan Fasilitas dan Kemitraan antar sektor dan Pemda	238.260.000	101.323.600	72,06%
2.	Terlaksananya layanan penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	1. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Badan Penghubung dan Anjungan Kalbar (TMII) pada hari-hari libur/kegiatan piket hari-hari libur	17 Orang	17 Orang	98,46%
		2. Pengelolaan Protokoler dan perjalanan Kepala Daerah/Wakil dan Pejabat Daerah di Jabotabek	48 Kali	44 Kali	90,7%
		3. pagelaran kesenian dan kebudayaan	12 Kali	11 Kali	90,34%
		4. Penyediaan Jasa Penggunaan Tanah dan Bangunan Gedung	13 PBB 4 Sewa Asrama	13 PBB 4 Sewa Asrama	94,73%



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

		5. Pengelolaan Mess Daerah	150.000.000	66.365.000	44,24 %
		6. Monitoring dan Evaluasi asrama mahasiswa Kalimantan Barat	16 Asrama	16 Asrama	100 %
		7. Pawai Budaya	1 Kali	-	-

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 :

Rp. 1.437.313.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 :

Rp. 1.330.115.522,00

Jakarta, 31 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


DASA SEKARTRIATIN ADINDA.S.SOS

Pembina Tingkat I

NIP. 19651006 198603 2 016